



**EVALUASI PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA NEGERI SE-SURABAYA
BERDASARKAN STANDAR KURIKULUM MERDEKA PASCAMASA PANDEMI
COVID-19**

Muhammad Fikri¹, Sri Mastuti Purwaningsih²
Universitas Negeri Surabaya^{1,2}
e-mail: muhammadfikri.22027@mhs.unesa.ac.id

Diterima: 14/05/2026; Direvisi: 23/05/2026; Diterbitkan: 21/06/2026

ABSTRAK

Penelitian evaluatif kualitatif ini mengkaji implementasi asesmen pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di seluruh Surabaya selama tahun ajaran 2022/2023 hingga 2024/2025, yang sempat menghadapi kendala awal akibat pandemi COVID-19. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang diintegrasikan dengan kerangka pembelajaran berdiferensiasi dan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK), penelitian ini mengevaluasi keselarasan asesmen tersebut dengan standar Kurikulum Merdeka. Data penelitian diperoleh melalui kajian dokumen serta wawancara dengan guru sejarah dan siswa di SMA Negeri 7, 8, 11, 15, dan 20 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian keseluruhan sebesar 87%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan asesmen belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi kurikulum. Secara spesifik, meskipun struktur evaluasi telah selaras dengan model CIPP, strategi pembelajaran berdiferensiasi baru diterapkan sebagian, dan pemanfaatan teknologi masih terbatas sebagai elemen pelengkap alih-alih terintegrasi secara penuh dalam proses asesmen. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penumbuhan budaya refleksi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan sangat esensial untuk menjembatani kesenjangan tersebut, meningkatkan praktik evaluasi, serta mencapai keselarasan penuh dengan standar kurikulum yang diamanatkan.

Kata Kunci: *Evaluasi Pembelajaran Sejarah, Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Berdiferensiasi, TPACK*

ABSTRACT

This qualitative evaluative study investigates the implementation of history learning assessments across state senior high schools in Surabaya during the 2022/2023 to 2024/2025 academic years, which faced initial constraints due to the COVID-19 pandemic. Using the CIPP evaluation model, integrated with frameworks for differentiated learning and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), this research evaluates the alignment of these assessments with the Merdeka Curriculum standards. Data were gathered through document reviews and interviews with history teachers and students at State Senior High Schools 7, 8, 11, 15, and 20 in Surabaya. The findings reveal an overall compliance rate of 87%, indicating that the assessments have not yet fully met curriculum expectations. Specifically, while the evaluation structure aligned with the CIPP model, differentiated learning strategies were only partially executed, and technology adoption remained limited to a complementary role rather than being fully integrated into the assessment process. Consequently, the study concludes that fostering a robust culture of reflection among all educational stakeholders is essential for



bridging these gaps, improving evaluation practices, and achieving full alignment with the mandated curriculum standards.

Keywords: *Assessment of History Learning, Merdeka Curriculum, Differentiated Learning, TPACK*

PENDAHULUAN

Implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran sejarah sudah berlangsung sejak tahun ajaran 2021/2022 melalui Kepmendikbud Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Hal tersebut awalnya diberlakukan secara terbatas di sekolah-sekolah penggerak, lalu diberlakukan secara nasional seiring berjalannya waktu. Hal tersebut berdampak pada evaluasi pembelajaran sejarah di SMA Negeri se-Surabaya. Hanya sedikit sekolah yang mengetahui cara melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah berdasarkan standar Kurikulum Merdeka. Perlu diketahui juga, saat itu pemerintah sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang membuat tidak terpenuhinya prasyarat untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah berdasarkan standar Kurikulum Merdeka.

SMA Negeri se-Surabaya diharapkan telah siap menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal tersebut ditandai dengan adanya evaluasi pembelajaran sejarah yang dilaksanakan secara berdiferensiasi dengan menitikberatkan pada perkembangan proses belajar peserta didik, pengintegrasian teknologi dalam evaluasi pembelajaran sejarah yang tidak hanya digunakan sebagai pelengkap. Kedua aspek tersebut berakar dari Teori Belajar Konstruktivisme Sosial yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky (1978), karena membangun pengetahuan peserta didik melalui teknologi yang sudah mereka kenal serta pengetahuan lain yang telah dimiliki sebelumnya, sekaligus mengakomodasi perbedaan pengetahuan yang dimiliki setiap peserta didik. Selain itu, terdapat timbal balik kepada guru sejarah terkait evaluasi pembelajaran sejarah yang dilaksanakan. Pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran sejarah secara keseluruhan dapat ditinjau dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Model evaluasi tersebut merupakan gabungan dari Teori Sistem yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy (1968) dan Teori Pengambilan Keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon (1960). Perpaduan kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai elemen yang memengaruhi kinerja suatu sistem diintegrasikan sehingga menghasilkan keputusan baru. Berbagai aspek tersebut digunakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2026) dalam menyusun dokumen-dokumen rujukan bagi guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.

Implementasi hal-hal tersebut diwujudkan melalui PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 dan Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kurikulum pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Lebih lanjut, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi teknologi yang digunakan pemerintah dalam menyusun dokumen-dokumen rujukan di atas merujuk pada karya-karya tokoh pendidikan Amerika Serikat. Yakni Carol Ann Tomlinson terkait pembelajaran berdiferensiasi (Purba et al., 2021) serta Punya Mishra dan Matthew J. Koehler (2006) terkait pengintegrasian teknologi melalui gagasan mereka tentang kerangka kerja TPACK (*Technological, Pedagogical, and Content Knowledge*).

Namun, evaluasi pembelajaran sejarah yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka karena tidak terpenuhinya prasyarat pelaksanaan Kurikulum Merdeka akibat pandemi Covid-19. Meskipun pandemi usai, dampaknya masih terasa dan berdampak pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah. Hal tersebut ditandai



dengan adanya peserta didik yang masih mengalami *learning loss* dan diperburuk oleh kenyataan bahwa metode evaluasi pembelajaran sejarah masih terkesan bersifat satu untuk semua dan penggunaan teknologi yang masih terkesan hanya sebagai pelengkap. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan skor PISA Indonesia pada bidang literasi (Avvisati & Ilizaliturri, 2023) dan laporan Kemendikbudristek yang menyatakan adanya penurunan kemampuan peserta didik (Wahyudin et al., 2024). Dengan demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah adalah hal yang penting untuk dilakukan. Mengingat bahwa pelajaran sejarah bisa menjadi landasan untuk membentuk memori kolektif dan identitas sosial (Susilo et al., 2025). Hal-hal tersebut juga sejalan dengan kurikulum yang telah diatur melalui program P5.

Hal-hal terkait ini juga sudah diteliti dan dipublikasikan dalam beberapa artikel jurnal. Penelitian-penelitian tersebut telah dilakukan di Sumatra (Anisa et al., 2024; Siregar & Syaripuddin, 2024; Sofia & Basri, 2023), Sulawesi (Darise & Darise, 2023), dan Jawa (Febriyanti & Sayono, 2024; Fitri et al., 2024; Syafary et al., 2024; Tasya et al., 2024). Temuan di Sulawesi menunjukkan kesesuaian pembelajaran sejarah dengan standar Kurikulum Merdeka. Sedangkan temuan di Sumatra dan Jawa menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah yang dilaksanakan hampir sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka, meskipun masih terhambat oleh berbagai kendala yang ada di setiap sekolah. Perbedaan temuan tersebut bisa dimaklumi karena temuan yang menunjukkan kesesuaian pembelajaran sejarah dengan standar Kurikulum Merdeka terjadi di SMA/MA yang berada di ibu kota provinsi. Sedangkan yang belum sesuai kerap terjadi di luar ibu kota provinsi. Dari berbagai penelitian tersebut, belum ada temuan terkait pembelajaran sejarah pada ibu kota provinsi di Jawa. Terutama, evaluasi terhadap kinerja guru sejarah dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah berdasarkan standar Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 hingga 2024/2025 di ibu kota provinsi Jawa Timur (Surabaya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif evaluatif dengan pendekatan fenomenologis. Hal tersebut akan memberikan deskripsi dan penilaian secara mendalam terhadap evaluasi pembelajaran sejarah yang dilakukan di SMA Negeri se-Surabaya pascamasa pandemi Covid-19. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan guru sejarah dan peserta didik serta studi literatur terhadap dokumen-dokumen modul ajar mata pelajaran sejarah, daftar nilai mata pelajaran sejarah seluruh peserta didik, dan notulensi atau berita acara rapat sekolah selama tahun ajaran 2022/2023 sampai 2024/2025. Sampel data dalam penelitian ini diambil melalui metode *purposive sampling* berdasarkan keterwakilan setiap kawasan di Surabaya. Atas hal tersebut, sampel penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi literatur di SMA Negeri 7, 8, 11, 15, dan 20 Surabaya.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model Miles & Huberman. Data yang diperoleh kemudian direduksi menjadi enam kategori: konteks, masukan, proses, hasil, pembelajaran berdiferensiasi, dan TPACK. Kategorisasi tersebut didasarkan pada model evaluasi CIPP, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan kerangka kerja TPACK. Setelah data tereduksi, data-data tersebut akan ditriangulasi dengan kategorinya masing-masing. Data dalam kategori konteks, masukan, proses, dan hasil akan dianalisis dengan model evaluasi CIPP; data dalam kategori pembelajaran berdiferensiasi akan dianalisis dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi; dan data dalam kategori TPACK akan dianalisis dengan kerangka kerja TPACK untuk kemudian disajikan—diberi persentase tingkat kesesuaiannya (CIPP 60%,



Pembelajaran Berdiferensiasi 20%, dan TPACK 20%)—dan disimpulkan. Data-data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks deskriptif terhadap fenomena yang ada untuk mempermudah penyajian perbandingan evaluasi pembelajaran sejarah berdasarkan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah sampel. Setelah data tersaji, peneliti menarik kesimpulan tentang kesesuaian antara evaluasi pembelajaran sejarah yang terlaksana dengan standar terkait evaluasi pembelajaran sejarah yang diatur dalam Kurikulum Merdeka.

Hal-hal tersebut dilakukan karena relevan untuk menjelaskan temuan-temuan dalam penelitian ini. Penggunaan pendekatan fenomenologis digunakan agar dapat memberikan deskripsi mendalam pada berbagai temuan tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah yang dilakukan di SMA Negeri se-Surabaya pascamasa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, wawancara terhadap guru dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah yang dilakukan di SMA Negeri se-Surabaya pascamasa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, wawancara terhadap peserta didik studi literatur pada berbagai dokumen modul ajar mata pelajaran sejarah, daftar nilai mata pelajaran sejarah seluruh peserta didik, dan notulensi atau berita acara rapat sekolah selama tahun ajaran 2022/2023 sampai 2024/2025 dilakukan sebagai informasi pembanding yang digunakan untuk triangulasi data. Lebih lanjut, *sampling* pada penelitian ini dilakukan seperti yang dijelaskan sebelumnya karena sekolah-sekolah yang dipilih sebagai sampel memiliki kondisi (infrastruktur, guru, dan peserta didik) yang mewakili berbagai sekolah di wilayahnya masing-masing. Dan lebih lanjut, persentase tingkat kesesuaian merujuk pada penelitian Wahyuningtyas & Kurniawan (2025). Penelitian tersebut menggunakan model evaluasi CIPP, pembelajaran berdiferensiasi, dan TPACK secara bersamaan, namun dengan pembobotan persentase yang masih tercampur. Penelitian ini menyesuaikan pembobotan persentase penelitian tersebut secara terpisah agar sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru sejarah dari SMAN 7, 8, 11, 15, dan 20 yang telah dianalisis lebih lanjut, secara umum seluruh SMA Negeri se-Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Baik pada proses pembelajaran maupun pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Selain itu, guru-guru sejarah berusaha menghadirkan inovasi agar dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah yang sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan kondisi kelas yang diajarnya. Mengingat kondisi kelas yang memiliki rasio jumlah guru sejarah terhadap peserta didik yang tinggi dan terbatasnya akses internet di sekolah, pembelajaran berdiferensiasi dan pengintegrasian teknologi digital dijalankan secara parsial—cenderung menggunakan teknologi nondigital. Lebih lanjut, hasil wawancara tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil temuan di SMAN 7 Surabaya.

Indikator	Hasil Temuan
Konteks	Guru sejarah mengetahui melalui MGMP Sejarah dan rapat sekolah bahwa evaluasi sejarah berbasis Kurikulum Merdeka lebih mengutamakan pembentukan karakter peserta didik daripada sekadar aspek kognitif.
Masukan	Guru sejarah memanfaatkan hasil tes diagnostik dan nilai semester lalu untuk menetapkan metode evaluasi yang efektivitasnya dipantau melalui

	capaian belajar peserta didik serta umpan balik dari supervisi kepala sekolah setiap semester.
Proses	Guru sejarah meniyasati kendala operasional dengan menyesuaikan jadwal kegiatan sekolah dan mengikuti mekanisme supervisi internal yang terintegrasi ke dalam sistem GTK. Di sisi lain, meskipun supervisi eksternal belum optimal dalam menyentuh aspek pedagogis, pelaporan capaian belajar peserta didik dilakukan secara konsisten melalui rapor.
Hasil	Guru sejarah menetapkan standar kelulusan (KKTP) sesuai kebijakan sekolah (naik secara berjenjang dari kelas 10 hingga 12) dan menghimpun hasil belajar peserta didik baik secara digital maupun konvensional. Tahap akhir evaluasi diwujudkan melalui pelaporan hasil belajar dalam bentuk rapor serta koordinasi langsung dengan wali murid.
Pembelajaran Berdiferensiasi	Guru sejarah tidak melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keragaman minat belajar maupun tingkat kesiapan belajar peserta didik.
TPACK	Guru sejarah menggunakan teknologi hanya sebatas pelengkap.
Tingkat Kesesuaian : 80%	

Evaluasi pembelajaran sejarah yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Hal tersebut dicerminkan oleh kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah yang—jika ditinjau dari model evaluasi CIPP—telah berpedoman pada standar Kurikulum Merdeka. Sayangnya, guru tidak melakukan diferensiasi pembelajaran sama sekali dan hanya menggunakan teknologi untuk penugasan.

Tabel 2. Hasil temuan di SMAN 8 Surabaya.

Indikator	Hasil Temuan
Konteks	Guru sejarah memanfaatkan PMM (Platform Merdeka Mengajar) untuk mendalami standar evaluasi Kurikulum Merdeka yang bersifat variatif dan berpusat pada peserta didik, yang selanjutnya dikomunikasikan melalui berbagai pertemuan formal di tingkat sekolah maupun MGMP Sejarah.
Masukan	Guru sejarah menetapkan metode evaluasi berdasarkan data diagnostik dan refleksi kuesioner peserta didik yang kemudian divalidasi oleh kepala sekolah melalui mekanisme peninjauan serta pemberian timbal balik terhadap modul ajar yang disusun.
Proses	Guru sejarah memetakan potensi kendala evaluasi melalui instrumen refleksi peserta didik dan menjalani supervisi rutin sebagai bentuk pengawasan formal kepada pihak dinas pendidikan. Hasil pelaksanaan evaluasi kemudian dilaporkan secara berkala melalui rapor dan forum rapat pleno kenaikan kelas.
Hasil	Guru sejarah menerapkan KKTP yang adaptif (naik secara berjenjang dari kelas 10 hingga 12) dan mengelola dokumentasi hasil belajar peserta didik dalam format hibrida (digital dan nondigital). Tahap akhir evaluasi diwujudkan melalui sistem pelaporan yang komprehensif, mencakup e-rapor, rapor sisipan, hingga rapor kenaikan kelas.

Pembelajaran Berdiferensiasi	Guru sejarah melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan keragaman minat belajar hanya pada bagian penugasan dan melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan keragaman tingkat kesiapan belajar secara keseluruhan, meskipun belum berjalan maksimal.
TPACK	Guru sejarah menggunakan teknologi hanya sebatas pelengkap.
Tingkat Kesesuaian : 90%	

Evaluasi pembelajaran sejarah yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Hal tersebut dicerminkan oleh kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah yang—jika ditinjau dari model evaluasi CIPP—telah berpedoman pada standar Kurikulum Merdeka. Sayangnya, guru melakukan diferensiasi pembelajaran—baik berdasarkan keragaman minat maupun tingkat kesiapan belajar peserta didik—dan memandang teknologi bukan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembelajaran, sehingga harus disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru.

Tabel 3. Hasil temuan di SMAN 11 Surabaya.

Indikator	Hasil Temuan
Konteks	Guru sejarah memperoleh pemahaman mengenai evaluasi berbasis Kurikulum Merdeka yang mengutamakan kebutuhan peserta didik melalui berbagai kanal resmi pemerintah. Proses ini diakhiri dengan pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi secara digital pada sistem Info GTK.
Masukan	Guru sejarah menetapkan metode evaluasi berdasarkan data rapor sebelumnya dan melakukan analisis SWOT (kekuatan dan kelemahan) melalui refleksi hasil belajar serta diskusi antarguru. Hasil analisis ini selanjutnya dilaporkan dalam forum rapat internal sekolah.
Proses	Guru sejarah mengantisipasi kendala evaluasi melalui praktik uji coba metode dan menjalani supervisi berkala sebagai bentuk kontrol kualitas. Proses ini diakhiri dengan pelaporan hasil belajar melalui rapor dan koordinasi formal antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan.
Hasil	Guru sejarah menetapkan standar penilaian berdasarkan hasil kesepakatan MGMP Sejarah (menggunakan nilai 75) dan mengumpulkan tugas siswa melalui kombinasi media daring serta luring. Seluruh pencapaian peserta didik selanjutnya dilaporkan dalam rapat internal sekolah sebagai dasar penyusunan rapor.
Pembelajaran Berdiferensiasi	Guru sejarah hanya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keragaman minat berdasarkan reaksi peserta didik dalam kelas tersebut setelah guru sejarah memberi pengantar tentang materi yang dipelajari. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kesiapan belajar dilaksanakan pada skala kelas.
TPACK	Guru sejarah menggunakan teknologi hanya sebatas pelengkap.
Tingkat Kesesuaian : 85%	

Evaluasi pembelajaran sejarah yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Hal tersebut dicerminkan oleh kemampuan guru dalam

merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah yang—jika ditinjau dari model evaluasi CIPP—telah berpedoman pada standar Kurikulum Merdeka. Sayangnya, guru belum melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan keragaman minat peserta didik dengan baik dan melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar peserta didik dengan menggeneralisasi pada skala kelas dan tidak mengakomodasi perbedaan peserta didik secara individual. Lebih lanjut, guru memandang teknologi bukan sebagai bagian integral dari pembelajaran, sehingga harus disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru.

Tabel 4. Hasil temuan di SMAN 15 Surabaya.

Indikator	Hasil Temuan
Konteks	Guru sejarah mengidentifikasi standar evaluasi Kurikulum Merdeka melalui peninjauan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma evaluasi yang kini lebih menitikberatkan pada proses pembelajaran dibandingkan sekadar hasil akhir, yang kemudian diakuntabilitaskan melalui platform Info GTK dan penyusunan laporan tertulis.
Masukan	Guru sejarah merancang metode evaluasi berdasarkan kesesuaian tujuan, materi, dan kebutuhan peserta didik, serta melakukan refleksi berkelanjutan untuk perbaikan. Mekanisme pelaporannya melibatkan dokumentasi tertulis, koordinasi langsung dengan atasan dan rekan sejawat, serta integrasi data pada sistem Info GTK.
Proses	Guru sejarah memitigasi kendala evaluasi dengan menganalisis profil kebutuhan peserta didik dan menjalani pengawasan rutin oleh pengawas serta kepala sekolah. Akuntabilitas proses evaluasi ini difinalisasi melalui pelaporan formal dalam bentuk dokumen tertulis, rapat koordinasi, dan pengisian e-rapor.
Hasil	Guru sejarah menyelaraskan standar KKTP berdasarkan rujukan MGMP Sejarah dan kebijakan sekolah (nilai KKTP naik secara berjenjang dari kelas 10 hingga 12), serta menghimpun hasil belajar melalui teknik penilaian langsung di kelas. Selanjutnya, diseminasi hasil belajar dilakukan secara terpadu melalui rapor dan forum diskusi bersama wali murid.
Pembelajaran Berdiferensiasi	Guru sejarah melaksanakan diferensiasi pembelajaran berdasarkan keragaman minat belajar hanya pada strategi pengajaran. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keragaman tingkat kesiapan belajar tidak sepenuhnya dilakukan dan hanya digunakan sebagai tutor sebaya.
TPACK	Guru sejarah menggunakan teknologi hanya sebatas pelengkap.
Tingkat Kesesuaian : 90%	

Evaluasi pembelajaran sejarah yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Hal tersebut dicerminkan oleh kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah yang—jika ditinjau dari model evaluasi CIPP—telah berpedoman pada standar Kurikulum Merdeka. Sayangnya, guru melakukan diferensiasi pembelajaran—baik berdasarkan keragaman minat maupun tingkat kesiapan belajar peserta didik—dengan mengandalkan tutor sebaya dan memandang teknologi

bukan sebagai bagian integral dari pembelajaran, sehingga harus menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru.

Tabel 5. Hasil temuan di SMAN 20 Surabaya.

Indikator	Hasil Temuan
Konteks	Guru sejarah mendalami standar evaluasi berbasis proses dalam Kurikulum Merdeka melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan platform online resmi. Temuan mengenai pergeseran paradigma evaluasi ini selanjutnya dilaporkan melalui pertemuan MGMP Sejarah serta proses supervisi internal sekolah.
Masukan	Guru sejarah menetapkan metode evaluasi berdasarkan profil diagnostik peserta didik dan mengevaluasi efektivitasnya melalui refleksi rutin setiap akhir materi. Mekanisme pelaporannya mencakup dokumentasi dalam modul ajar serta sistem Info GTK yang memfasilitasi proses supervisi dan diskusi kolegial bersama kepala sekolah serta sesama guru sejarah.
Proses	Guru sejarah memetakan kendala evaluasi melalui refleksi pedagogis dan menjalani mekanisme supervisi berjenjang setiap semester. Tahap akhir dari proses ini diwujudkan dalam pelaporan hasil belajar peserta didik melalui instrumen rapor sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional.
Hasil	Guru sejarah menyelaraskan standar KKTP berdasarkan hasil koordinasi MGMP Sejarah di sekolah (menggunakan nilai 75) dan mengumpulkan hasil belajar peserta didik baik secara daring maupun luring. Tahap akhir evaluasi diselesaikan melalui pelaporan hasil belajar dalam bentuk penyerahan rapor kepada pemangku kepentingan.
Pembelajaran Berdiferensiasi	Guru sejarah melaksanakan diferensiasi pembelajaran berdasarkan keragaman minat belajar hanya pada tagihan tugas. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keragaman tingkat kesiapan belajar tidak dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan waktu pembelajaran dan adanya kecenderungan peserta didik untuk enggan berkembang apabila dikelompokkan bersama dengan peserta didik lain yang kurang memahami materi.
TPACK	Guru sejarah menggunakan teknologi hanya sebatas pelengkap.
Tingkat Kesesuaian : 90%	

Evaluasi pembelajaran sejarah yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Hal tersebut dicerminkan oleh kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah yang—jika ditinjau dari model evaluasi CIPP—telah berpedoman pada standar Kurikulum Merdeka. Sayangnya, guru belum melakukan diferensiasi pembelajaran—baik berdasarkan keragaman minat maupun tingkat kesiapan belajar peserta didik—secara maksimal dan memandang teknologi bukan sebagai bagian integral dalam pembelajaran, sehingga harus menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru.



Pembahasan

Selama kurun waktu tahun ajaran 2022/2023 sampai 2024/2025, guru-guru sejarah telah berusaha melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Meskipun selama ini belum bisa terlaksana secara maksimal karena berbagai hal. Hal-hal tersebut meliputi diferensiasi pembelajaran yang belum berjalan optimal dan kecenderungan pengintegrasian teknologi yang hanya sebagai pelengkap. Hal tersebut tercermin dalam hasil wawancara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah di SMA Negeri se-Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka karena hasil temuan yang ada telah sesuai dengan model evaluasi CIPP dan kerangka kerja TPACK, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara hasil temuan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.

Penelitian ini menemukan bahwa guru-guru sejarah telah mengetahui informasi terkait evaluasi pembelajaran sejarah yang ideal berdasarkan standar Kurikulum Merdeka melalui forum MGMP, forum sekolah, lokakarya guru penggerak, peraturan perundang-undangan, kementerian terkait, serta platform digital (Info GTK dan PMM). Mereka juga mengetahui bahwa permasalahan evaluasi pembelajaran sejarah yang dijawab oleh Kurikulum Merdeka adalah kecenderungan pembelajaran yang sebelumnya lebih berfokus pada hasil belajar peserta didik, kemudian diubah menjadi lebih berfokus pada proses belajar peserta didik. Mereka juga mengetahui bahwa pelaporan evaluasi pembelajaran sejarah setelah diterapkannya Kurikulum Merdeka kepada berbagai pihak terkait dilakukan melalui platform Info GTK, forum sekolah, dan forum MGMP Sejarah. Temuan-temuan tersebut cukup selaras dengan hasil penelitian terdahulu (Asy'Ari et al., 2025). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan yang cukup dari pembuat kebijakan terhadap informasi yang dibutuhkan dalam merencanakan sesuatu dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Hal tersebut juga turut dipengaruhi oleh kapasitas diri dari pembuat kebijakan. Namun, perlu diketahui bahwa subjek dari penelitian terdahulu adalah administrator kampus (dekan, unit pengawasan internal, badan penjaminan mutu, biro perencanaan dan keuangan, bagian keuangan, dan bagian kepegawaian) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Bukan secara spesifik pada guru-guru sejarah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah. Ditinjau dari perspektif kategori konteks (Stufflebeam, 2003:56), guru telah melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan model evaluasi CIPP pada bagian konteks karena temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran berdasarkan standar Kurikulum Merdeka.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa guru-guru sejarah telah mengetahui informasi terkait penentuan metode evaluasi pembelajaran sejarah yang sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka melalui pertimbangan terhadap hasil diagnostik peserta didik dan hasil belajar peserta didik pada semester sebelumnya. Mereka juga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari metode evaluasi yang telah ditentukan melalui refleksi hasil belajar peserta didik, pendapat sesama guru, dan timbal balik peserta didik terhadap metode evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mereka juga mengetahui bahwa pelaporan metode evaluasi yang telah ditentukan kepada kepala sekolah dan/atau pihak lain dilakukan melalui supervisi kepala sekolah/yang mewakili, pengumpulan modul ajar, dan pembuatan laporan ke platform info GTK. Temuan-temuan tersebut cukup sama dengan hasil penelitian terdahulu (Nurhakim & Fahrudin, 2022) meskipun terdapat perbedaan narasumber guru—tidak disebutkan secara spesifik siapa guru sejarah yang diwawancarai — dengan penelitian ini. Hasil



penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi guru, kesediaan sarana dan prasarana sekolah, serta alokasi waktu mengajar turut memengaruhi pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah. Sedangkan pada penelitian ini, guru menjadi tokoh utama yang menyesuaikan diri dengan berbagai hal yang ada (kondisi sekolah dan peserta didik). Ditinjau dari perspektif kategori masukan (Stufflebeam, 2003:57), guru telah melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan model evaluasi CIPP pada bagian masukan karena mereka mengetahui kewajibannya untuk menentukan metode evaluasi pembelajaran sejarah yang akan digunakan sebelum melakukan evaluasi pembelajaran sejarah pada peserta didiknya.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa guru-guru sejarah dapat mengidentifikasi berbagai hal yang berpotensi menghambat penerapan metode evaluasi pembelajaran sejarah yang telah sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka melalui timbal balik peserta didik dan refleksi terhadap pembelajaran sebelumnya serta menyasiasi kendala operasional dengan menyesuaikan jadwal kegiatan sekolah. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah yang telah sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka (dilakukan oleh guru) juga dipantau melalui supervisi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau yang mewakili setiap semester. Guru juga mengetahui bahwa pelaporan hasil evaluasi pembelajaran sejarah yang telah sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka secara berkala dilakukan melalui rapat sekolah setiap akhir semester dan pembuatan laporan tertulis berupa rapor peserta didik. Temuan-temuan tersebut lebih lengkap dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Jazimah & Septianingsih, 2023). Perlu diketahui bahwa penelitian terdahulu dilakukan di lingkup perguruan tinggi. Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa dosen—jika dalam konteks SMA, perannya dipadankan dengan guru—melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditentukan kepada mahasiswanya—jika dalam konteks SMA, perannya dipadankan dengan peserta didik—. Namun, penelitian terdahulu tidak menjelaskan keberadaan pemantauan secara berkala pada dosen selama melaksanakan evaluasi pembelajaran. Sedangkan penelitian ini menjelaskan hal tersebut (pemantauan berkala). Ditinjau dari perspektif kategori proses (Stufflebeam, 2003:58), guru telah melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan model evaluasi CIPP pada bagian proses karena telah menyediakan informasi pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah secara lengkap.

Dan lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa guru-guru sejarah mengetahui bahwa penentuan tingkat ketercapaian berdasarkan hasil belajar peserta didik dilakukan melalui penyusunan KKTP yang berdasarkan kebijakan dari forum MGMP Sejarah atau sekolah. Mereka juga mengumpulkan hasil belajar peserta didik secara hibrida serta melaporkan hasil belajar peserta didik melalui pemberian rapor hasil belajar peserta didik dan berkoordinasi dengan wali murid. Temuan-temuan tersebut lebih luas dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Martaliza et al., 2025). Perlu diketahui bahwa penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan modul Merdeka Belajar untuk mata pelajaran sejarah pada peserta didik di tiga SMA Negeri yang berbeda di Kota Padang. Penelitian terdahulu menemukan bahwa penggunaan metode evaluasi pembelajaran sejarah yang tepat dapat membuat peserta didik memenuhi tujuan pembelajaran. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus pada penggunaan modul Merdeka Belajar yang kemudian dianalisis dengan model evaluasi CIPP. Sehingga, analisis pada bagian produk tidak seluas pada penelitian ini yang dapat menjelaskan tindak lanjut dari hasil belajar peserta didik. Ditinjau dari perspektif kategori hasil (Stufflebeam, 2003:59-62), guru telah melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan model evaluasi CIPP pada bagian hasil karena telah menghubungkan hasil evaluasi dengan berbagai



tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan menilai secara keseluruhan pembelajaran sejarah yang telah dilaksanakan berdasarkan dampaknya pada peserta didik dan sekolah.

Di lain sisi, penelitian ini menemukan bahwa guru-guru sejarah telah memanfaatkan teknologi digital seperti Canva, Microsoft Powerpoint, Google Classroom, dan lain-lain agar pembelajaran dapat berjalan lebih efisien, praktis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, teknologi digital yang digunakan tidak diintegrasikan secara penuh. Hal tersebut bisa terjadi karena gurunya yang enggan menggunakan (dirasa tidak relevan untuk peserta didik) atau karena infrastruktur digital sekolahnya yang belum mumpuni (Wi-Fi sekolah berjalan lambat/sengaja diatur untuk bisa digunakan ketika asesmen sumatif saja). Sehingga guru telah membiasakan diri untuk tetap bisa menjalankan pembelajaran beserta evaluasinya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada teknologi digital, dan hasil evaluasi tidak dapat keluar secara langsung—karena harus diolah secara manual terlebih dahulu oleh guru. Berbeda dengan teknologi nondigital, guru telah mengintegrasikannya secara penuh melalui penggunaan papan tulis, ATK, dan buku untuk menunjang jalannya pembelajaran beserta evaluasinya. Hal tersebut dilakukan karena guru dituntut untuk membentuk karakter peserta didik yang disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan komunikatif. Pembentukan karakter tersebut lebih sukses dilakukan melalui pendekatan personal secara langsung melalui media nondigital daripada digital. Sehingga guru akan kesulitan dalam menjalankan pembelajaran beserta evaluasinya jika tidak dibantu dengan teknologi nondigital. Meskipun hasil evaluasi pembelajarannya pasti membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar daripada yang dilakukan secara digital. Temuan-temuan tersebut kurang lebih selaras dengan hasil penelitian terdahulu (Ali et al., 2020). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya peningkatan kualitas mengajar pada guru yang mengimplementasikan TPACK secara penuh. Namun, penelitian terdahulu ini berfokus pada kualitas pengajaran guru dari berbagai guru yang mengajar di 43 institusi pendidikan publik maupun swasta di Pakistan dan bukan pada evaluasi pembelajaran sejarah secara khusus (terutama di Indonesia maupun Surabaya). Ditinjau melalui perspektif kerangka kerja TPACK (Harris et al., 2010), guru telah mengintegrasikan teknologi (meskipun belum sepenuhnya) dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan kerangka kerja TPACK karena belum mengintegrasikan teknologi digital secara penuh dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran—hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 7 Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Sayangnya, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada evaluasi pembelajaran sejarah di SMA Negeri se-Surabaya belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman minat belajar maupun tingkat kesiapan belajar peserta didik. Sebagian besar guru sejarah di SMA Negeri se-Surabaya sebenarnya sepakat akan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Namun, hal tersebut sulit diwujudkan karena kondisi kelas yang tidak ideal (jumlah peserta didik yang terlalu banyak, waktu pembelajaran yang terlalu singkat, atau tingkat kemampuan peserta didik yang relatif sama). Kondisi tersebut mengakibatkan upaya diferensiasi yang dilakukan guru-guru sejarah menjadi terbatas pada pemetaan perbedaan karakteristik peserta didik. Setelahnya, guru merancang pembelajaran melalui kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan peserta didik dengan keragaman minat belajar dan tingkat kesiapan pembelajaran yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bertujuan agar peserta didik dapat berkembang melalui adanya tutor sebaya. Apabila mereka dikelompokkan dengan sesama peserta didik yang memiliki keseragaman dalam minat belajar maupun tingkat kesiapan belajar, mereka akan cenderung enggan untuk berkembang. Pembelajaran berdiferensiasi seharusnya



mengelompokkan peserta didik yang memiliki keragaman minat atau tingkat kesiapan belajar yang sama dalam satu kelompok. Sehingga, peserta didik seharusnya dapat mengembangkan diri mereka secara maksimal tanpa harus menunggu teman yang memiliki perbedaan minat maupun tingkat kesiapan belajar. Temuan-temuan tersebut kurang lebih selaras dengan hasil penelitian terdahulu (Jayanti et al., 2023). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya pelaksanaan asesmen diagnostik serta diferensiasi produk bagi setiap kelompok peserta didik. Ditinjau melalui perspektif pendekatan pembelajaran berdiferensiasi (Purba et al., 2021), guru belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam evaluasi pembelajaran sejarah karena tidak sepenuhnya melaksanakan evaluasi pembelajaran yang mengakomodasi keragaman minat dan tingkat kesiapan belajar peserta didik secara penuh.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa guru-guru sejarah sebenarnya telah mengetahui bagaimana melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah yang sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka serta (paling tidak) telah mengimplementasikannya pada modul ajar untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik yang terukur secara objektif dan dapat ditindaklanjuti. Guru juga menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan, sehingga cara mengajar dan mengevaluasinya tidak serta-merta dilakukan secara seragam. Guru juga menyadari pentingnya teknologi digital pada masa kini dan untuk masa depan peserta didiknya. Namun, upaya tersebut sering kali terlaksana secara searah/*top-down* (dari guru ke peserta didik). Kurikulum Merdeka nampaknya menginginkan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara *bottom-up* (berangkat dari keragaman peserta didik yang kemudian diakomodasi oleh guru), namun tetap menuntut guru menyusun modul ajar yang berisi rencana pembelajarannya sebelum melakukan asesmen diagnostik dan bukan sebaliknya. Hal tersebut menyebabkan evaluasi pembelajaran yang direncanakan guru menjadi tidak berjalan secara maksimal karena harus diubah menyesuaikan dengan peserta didik. Hal tersebut seharusnya dapat dicegah dengan pelaksanaan asesmen diagnostik terlebih dahulu sebelum pembuatan modul ajar. Pelaksanaan hal tersebut akan membuat guru lebih mengetahui kondisi peserta didik yang diajar dan akan dievaluasi hasil belajarnya, sehingga guru dapat mengevaluasi pembelajaran dengan lebih berdiferensiasi (sesuai dengan keragaman minat maupun tingkat kesiapan peserta didik) menggunakan teknologi yang relevan dan pastinya akan sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka.

KESIMPULAN

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah fenomenologis terkait kinerja guru sejarah di Surabaya dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah. Hal tersebut tercermin melalui temuan bahwa guru sejarah belum sepenuhnya melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka karena pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi masih terbatas secara parsial dan penggunaan teknologi hanya sebatas pelengkap pembelajaran. Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah selama tahun ajaran 2022/2023 sampai 2024/2025 belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka (kurang berorientasi pada proses belajar peserta didik). Sehingga, evaluasi pembelajaran sejarah ke depannya harus lebih berorientasi pada proses belajar peserta didik.

Penelitian ini juga menyadari adanya berbagai keterbatasan yang membuat perlu adanya pengembangan pada penelitian ke depannya. Keterbatasan tersebut meliputi pemilihan sampel di SMA Negeri tertentu saja—tanpa mencakup seluruh SMA sederajat di Surabaya baik negeri maupun swasta—, guru yang diwawancarai hanyalah guru yang telah mendapatkan sertifikasi



pendidik—sehingga tidak adanya informasi terkait hal serupa dari guru yang belum mendapatkan sertifikasi pendidik—, dan tidak tersedianya secara penuh beberapa dokumen terkait evaluasi pembelajaran sejarah yang dibutuhkan—sehingga informasi yang berasal dari dokumen sekolah lain digunakan untuk generalisasi informasi karena kapabilitas sekolah yang relatif sama.

Penelitian ke depannya dapat dikembangkan dengan mengubah berbagai hal yang telah ada pada penelitian ini. Seperti mengubah metodenya dengan metode kuantitatif, memperluas cakupan wilayah atau sekolah di luar SMA Negeri Surabaya (SMK atau MA), mengubah subjek kurikulumnya dengan kurikulum internasional (Cambridge, International Baccalaureate, dan lain-lain), atau membandingkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran berdasarkan standar Kurikulum Merdeka dengan kurikulum internasional.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran sejarah di SMA Negeri se-Surabaya selama tahun ajaran 2022/2023 sampai 2024/2025 belum sepenuhnya sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Harus ada budaya reflektif dari guru, sekolah, dan MGMP agar evaluasi pembelajaran sejarah dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan standar kurikulum. Guru dapat mulai aktif membangun budaya reflektif secara konsisten dan bersikap lebih fleksibel ketika mengadaptasi instrumen evaluasi pembelajaran sejarah yang berorientasi pada peserta didik. Sekolah harus mendukung penyediaan prasarana digital yang memadai secara merata serta memberikan apresiasi dan tindak lanjut konkret terhadap hasil evaluasi berkala guru. Dan MGMP dapat meningkatkan frekuensi pertemuan/lokakarya untuk merancang evaluasi pembelajaran sejarah yang terstandar, namun tetap dinamis dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., Thomas, M., & Hamid, S. (2020). Teacher Educators' Perception of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge on their Classroom Teaching. *New Horizons*, 14(2), 17–38. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/teacher-educators-perception-technological/docview/2474524930/se-2?accountid=139588>
- Anisa, R., Ahmal, & Suroyo. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah Secara Efektif di SMA Islam As-Shofa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 8031–8036. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5640>
- Asy'Ari, H., Komariah, A., Yuliana, L., Zahrudin, Silviani, A., & Vebrianto, R. (2025). CIPP Model Evaluation of The Impact of Remuneration Policies on Lecturer Performance in Indonesian State Islamic Universities. *Cakrawala Pendidikan*, 44(3), 740–756. <https://doi.org/10.21831/cp.v44i3.90018>
- Avvisati, F., & Ilizaliturri, R. (2023). *PISA 2022 Results: Factsheets - Indonesia*. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html
- Darise, G. N., & Darise, I. W. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Fase E di MAN Model 1 Plus Keterampilan Manado. *Jurnal Ilmiah Iqra*, 17(2), 169–181. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/2368>
- Febriyanti, A. H., & Sayono, J. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Pembelajaran Sejarah Kelas X di SMAN 4 Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1), 26–51. <https://doi.org/10.21009/jps.131.02>
- Fitri, D. A., Aziz, M. F. A., & Fajriyah, I. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Sejarah pada Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. *Jurnal Artefak*, 11(1), 65–74. <https://doi.org/10.25157/ja.v11i1.13965>



- Harris, J., Grandgenett, N., & Hofer, M. (2010). Testing a TPACK-based technology integration assessment instrument. Dalam C. D. Maddux, D. C. Gibson, & B. Dodge (Ed.), *Research highlights in technology and teacher education 2010* (hlm. 323–331). Society for Information Technology and Teacher Education (SITE).
- Jayanti, S. D., Suprijono, A., & Jacky, M. (2023). Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 22 Surabaya. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 561–566. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i1.304>
- Jazimah, I., & Septianingsih, S. (2023). Evaluasi Pembelajaran Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) pada Materi Sejarah Asia Selatan. *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(3), 219–231. <https://doi.org/10.23887/jjps.v11i3.69851>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Rujukan Kurikulum*. <https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/rujukan>
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.
- Martaliza, M., Ofianto, O., & Zakaria, N. B. (2025). Evaluation of Merdeka Belajar Module in Learning Differentiation of History at Senior High School Level Using the CIPP Model. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1), 17–26. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v12i1.83702>
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Nurhakim, H. A., & Fahrudin. (2022). Evaluasi Program Pembelajaran Sejarah Daring dengan Model CIPP. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(2), 111–118. <https://doi.org/10.21009/jep.v13i2.27456>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Purba, M., Purnamasari, N., Soetantyo, S., Suwarna, I. R., & Susanti, E. I. (2021). *Prinsip Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi (Differentiated Instruction) pada Kurikulum Fleksibel sebagai Wujud Merdeka Belajar* (M. Purba, M. Y. Saad, & M. Falah, Ed.; 1 ed.). Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia.
- Simon, H. A. (1960). *The New Science of Management Decision*. Harper & Row.
- Siregar, A. P., & Syaripuddin, A. (2024). Implementasi Pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum Merdeka Kelas X di SMA Penggerak Portibi. *Jurnal Tarombo Pendidikan Sejarah IPTS*, 5(2), 26–37. <https://jurnal.ipts.ac.id/index.php/tarombo/article/view/5138>
- Sofia, S. A., & Basri, W. (2023). Implementasi Pembelajaran Sejarah berdasarkan Kurikulum Merdeka di SMAN 2 Padang. *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 26–41. <https://doi.org/10.23887/jjps.v11i1.59513>



- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP model for evaluation*. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31–62). Kluwer Academic Publishers.
- Susilo, A., Anwar, K., & Agung S, L. (2025). Kontribusi Narasi Sejarah dalam Pembentukan Memori Kolektif dan Identitas Sosial. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 8(3), 242–251. <https://doi.org/10.31539/joeai.v8i3.14903>
- Syafary, I. M., Hamdani, M. I. I., & Arifin, I. F. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah di Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Rambipuji. *Jurnal Sandhyakala*, 5(1), 1. <https://jurnal.unipar.ac.id/index.php/sandhyakala/article/view/1618>
- Tasya, A., Widayari, R., & Yudiana, I. K. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Sejarah di MAN 3 Banyuwangi. *Jurnal Sangkala*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.62734/js.v3i2.261>
- von Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications* (2 ed.). George Braziller.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Ed.). Harvard University Press.
- Wahyudin, D., Subkhan, E., Malik, A., Hakim, Moh. A., Sudiapermana, E., Alhapi, L., Anggraena, Y., Maisura, R., Amalia, N. R. A. S., Solihin, L., Ali, N. B. V., & Krisna, F. N. (2024). *Kajian Akademik Kurikulum Merdeka*.
- Wahyuningtyas, N., & Kurniawan, B. (2025). Pendampingan Pengembangan Modul Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial Terintegrasi Diferensiasi Belajar dan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) untuk Meningkatkan Kompetensi Guru di Era Society. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 10(1), 37–46. <https://doi.org/10.33366/japi.v10i1.6450>